

Aplikasi MonSAKTI: Kunci Menuju Laporan Keuangan Pemerintah yang Berkualitas

Yusup Setiawan¹, Agus Munandar²

Universitas Esa Unggul, Indonesia

agus.munandar@esaunggul.ac.id

Submitted: 11th Jan 2025 | **Edited:** 17th April 2025 | **Issued:** 01st June 2025

Cited on: Setiawan, Y., & Munandar, A. (2025). Aplikasi Monsakti: Kunci Menuju Laporan Keuangan Pemerintah yang Berkualitas. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 12(1), 327-337.

Abstract

The integration of information technology into public sector accounting has significantly transformed business processes and financial reporting. MonSAKTI ensures data accuracy through reconciliation and monitoring, resulting in high quality government financial statements. This study examines the effectiveness of MonSAKTI in generating government financial reports. The study involves analyzing MonSAKTI's features and evaluating their alignment with regulatory standards. The results indicate that all features are accessible and utilized effectively for monitoring and compiling government financial reports. The study aims to determine the system's compliance with regulatory standards and provide recommendations for system's improvement.

Keywords: Reconciliation; Monitoring; MonSAKTI; Government Financial Statements

Abstrak

Implementasi teknologi informasi sebagai sistem akuntansi terintegrasi di sektor publik telah menghasilkan transformasi signifikan pada proses bisnis dan penyusunan laporan keuangan. Aplikasi MonSAKTI berperan penting dalam memastikan akurasi data transaksi melalui proses rekonsiliasi dan monitoring, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji kemampuan aplikasi MonSAKTI dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Penelitian dilakukan dengan mengakses fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi MonSAKTI serta mengevaluasi kesesuaian fitur-fitur tersebut dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua fitur dapat diakses dan digunakan pengguna dalam memantau data serta menyusun laporan keuangan pemerintah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana sistem informasi telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem jika diperlukan.

Kata Kunci: Rekonsiliasi; Monitoring; MonSAKTI; Laporan Keuangan Pemerintah

PENDAHULUAN

Mencapai pemerintahan yang bersih dan baik di Indonesia dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep Good Governance (Marpaung, 2020). Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pemanfaatan sistem informasi sebagai sarana untuk mencapai Good Governance, sebagaimana yang telah diterapkan secara luas di sektor privat (Amriani & Iskandar, 2019). Tujuan utama dari penerapan Good Governance adalah mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan melayani kepentingan rakyat dengan cara mudahnya publik mengakses informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah. Dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan, setiap

pengelola keuangan negara diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa instansi pemerintah harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik untuk menjamin kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Salah satu bagian penting dari sistem pengendalian ini adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi melibatkan perbandingan data keuangan antara catatan yang disimpan oleh Bendahara Umum Negara (yang menampung seluruh dana negara) dengan catatan di Kementerian/Lembaga untuk memastikan kebenaran kedua catatan tersebut (Khuluq et al., 2022). Data rekonsiliasi yang akurat digunakan untuk membuat laporan keuangan mulai dari tingkat satuan kerja (satker) hingga laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. LKPP disusun melalui proses akuntansi dan sesuai dengan standar akuntansi (Baihaqi, 2020). LKPP bertujuan memberikan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan negara, seperti realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, laporan operasional, dan perubahan ekuitas. Informasi ini harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Pratiwi et al., 2022). Dengan adanya rekonsiliasi dan laporan keuangan yang baik, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana uang negara digunakan.

Kualitas data laporan keuangan menjadi tolok ukur keandalan informasi keuangan suatu entitas. Untuk memenuhi standar, Kementerian/Lembaga melakukan pengawasan berkala terhadap kualitas data laporan mereka. Semua unit akuntansi dan pelaporan keuangan diwajibkan memantau secara rutin agar semua data dalam laporan keuangan sesuai aturan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan segera dilakukan.

Dengan berkembangnya tuntutan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, bukan hanya kualitas rekonsiliasi yang ditingkatkan namun semua yang berkaitan dengan proses bisnis penyusunan dan penyampaian laporan keuangan juga ditingkatkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 telah mengamanatkan untuk disusun Perdirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai ketentuan monitoring kualitas data dan tindak lanjutnya, tata cara rekonsiliasi, penyampaian laporan keuangan dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi akan dikenakan pada satker yang masih memiliki data laporan keuangan berkualitas rendah, rekonsiliasi belum selesai, atau terlambat menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut telah disusun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 yang mengatur standar yang lebih spesifik untuk proses rekonsiliasi, pengendalian kualitas data, dan penyusunan laporan keuangan bagi semua entitas akuntansi. Pengawasan sesuai PER-8/PB/2023 ini dilakukan melalui pemeriksaan langsung dokumen dan data serta pemantauan melalui sistem informasi.

Penerapan sistem akuntansi terintegrasi berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan cara rekonsiliasi transaksi keuangan negara (Chairmanita, 2023). Penerapan teknologi informasi telah mengotomasi banyak proses dalam rekonsiliasi dan pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan

efisiensi dan akurasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sejak implementasi penuh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di seluruh kementerian/lembaga pada tahun 2022, MonSAKTI telah menjadi platform utama bagi seluruh kementerian/lembaga untuk mengelola proses bisnis keuangan, termasuk rekonsiliasi.

Pengembangan SAKTI dan MonSAKTI didorong oleh kebutuhan akan sebuah sistem keuangan terintegrasi seperti yang diusung oleh konsep sistem pengelolaan keuangan terpadu yang saat ini menjadi tuntutan pengelolaan keuangan modern (Dewi Astuti et al., 2023). MonSAKTI adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. MonSAKTI memiliki fitur to do list dalam memastikan keakuratan dan kelengkapan pelaporan keuangan (Salsabila & Laksmi, 2024). MonSAKTI adalah kunci untuk membuka era baru transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai wujud penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara yang komprehensif secara sistem.

Aplikasi MonSAKTI mungkin tidak sepenuhnya memenuhi semua tujuan rekonsiliasi dan monitoring sesuai PER-8/PB/2023. Beberapa fungsi pengawasan mungkin belum terakomodasi sepenuhnya ke dalam aplikasi. Penelitian ini akan mendeskripsikan fitur-fitur spesifik MonSAKTI yang relevan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, peneliti juga mengevaluasi ketersediaan fitur dalam MonSAKTI sesuai dengan amanat peraturan PER-8/PB/2023, sehingga diharapkan penelitian ini dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan pengembangan aplikasi MonSAKTI di masa depan.

LANDASAN TEORI

Laporan Keuangan Pemerintah

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berkualitas kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemerintah berupaya mencapai tujuan tersebut. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berperan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). SAP memberikan kerangka kerja yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sesuai dengan syarat kualitatif laporan keuangan. LKPP minimal mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Laporan keuangan pemerintah yang secara berkala diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawasan internal pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan negara. Temuan audit dapat mengungkap kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan menyarankan perbaikan. Opini BPK menjadi acuan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara.

Rekonsiliasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 telah menetapkan bahwa rekonsiliasi merupakan langkah yang wajib dilakukan untuk memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah. Proses pencocokan data ini melibatkan seluruh entitas pemerintah, mulai dari tingkat satuan kerja hingga tingkat pusat. Rekonsiliasi berperan krusial dalam memastikan konsistensi dan akurasi data keuangan dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). Proses pencocokan data dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya perbedaan data yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Mengingat adanya potensi perbedaan pencatatan data antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara, maka diperlukan mekanisme rekonsiliasi data untuk menjaga integritas laporan keuangan pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data yang berasal dari dokumen sumber yang sama.

Setiap unit kerja wajib melakukan rekonsiliasi data secara berkala untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Proses ini mencakup pencocokan data antara catatan sub-ledger dan general ledger, serta antara unit kerja dengan bendahara umum negara. Elemen data yang direkonsiliasi meliputi alokasi anggaran, realisasi belanja, proyeksi dan realisasi penerimaan, dan mutasi kas pada berbagai rekening. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yang menjadi bukti telah dilakukannya verifikasi data keuangan.

Aplikasi MonSAKTI

Kementerian Keuangan telah meluncurkan aplikasi MonSAKTI, sebuah platform digital yang dirancang untuk memantau, mencocokkan, dan menghasilkan laporan keuangan berbasis data dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). MonSAKTI memungkinkan pengguna untuk memantau secara real-time data transaksi, melakukan pencocokan data, serta menghasilkan berbagai laporan keuangan yang diperlukan. Pengembangan MonSAKTI didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 dan platform ini dapat diakses melalui <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>.

MonSAKTI hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan analisis data yang lebih kompleks dalam pengelolaan keuangan. Dengan mengadopsi teknologi pengolahan analitik online (OLAP), MonSAKTI memungkinkan pengguna untuk menggali berbagai informasi penting dari data transaksi SAKTI. Platform ini tidak hanya mendukung fungsi pemantauan dan evaluasi, tetapi juga memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Fitur ini sangat bermanfaat bagi berbagai pengguna, termasuk satuan kerja, kantor pusat, dan auditor. Selain itu, dengan memisahkan fungsi data transaksional dan analisis data, MonSAKTI juga berkontribusi pada peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan.

MonSAKTI tidak hanya berfungsi sebagai platform pelaporan internal, tetapi juga dirancang untuk menjadi bagian dari ekosistem sistem informasi yang lebih luas. Platform ini dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Kementerian/Lembaga, seperti SIRUP, SIMAN, dan Siswas BPKP. Integrasi ini memungkinkan dilakukannya pertukaran data secara real-time, sehingga analisis data dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi kasus. Peneliti melakukan analisis terhadap aplikasi MonSAKTI dengan mengakses seluruh fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Proses ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana fitur-fitur yang tersedia dapat mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Setiap fitur dieksplorasi untuk mengidentifikasi kemampuannya dalam memantau data keuangan serta memproses informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan keuangan.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan perbandingan antara fitur aplikasi MonSAKTI dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan keuangan pemerintah. Evaluasi dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian antara fungsionalitas aplikasi dan ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah terkait penyusunan laporan keuangan. Peneliti mencatat kemudahan akses dan penggunaan aplikasi oleh pengguna, serta efektivitas fitur dalam menyajikan data dan informasi yang diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang sejauh mana aplikasi MonSAKTI mendukung proses pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai regulasi.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis login ke aplikasi MonSAKTI tahun anggaran 2024 menggunakan user role super admin. Data yang diakses adalah data pada 19.737 satuan kerja sampai periode Triwulan III Tahun 2024. Data transaksi yang diinputkan pengguna SAKTI akan secara otomatis dikirim ke MonSAKTI tanpa memerlukan tindakan manual. Proses ini memastikan data selalu up to date dan siap untuk dianalisis. Selanjutnya MonSAKTI akan melakukan proses Online Analytical Processing (OLAP) dan data hasil OLAP tersebut ditampilkan pada menu interface aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna.

Penulis melakukan pengujian terhadap aplikasi ini dengan membandingkan fitur dan fungsinya dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023. Peraturan tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa MonSAKTI harus memiliki fitur-fitur seperti Rekonsiliasi, To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian.

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi data laporan keuangan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh unit kerja. Proses ini dapat dilakukan melalui aplikasi MonSAKTI, khususnya pada menu rekonsiliasi internal yang tampilannya seperti pada Gambar 1.

Monitoring Detail Rekonsiliasi Internal ASET, PERSEDIAAN DAN PIUTANG berdasarkan Buku Besar Periode 09						
Data diperbarui setiap 6 jam, pembaharuan terakhir pada: 21-10-2024 22:05						
DATA REKON INTERNAL DETAIL		TAHUN REKON INTERNAL SEMUA		14 LAINNYA		
NO	BAESOLN I	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	PERIODE
1				115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	09
2				117111	Barang Konsumsi	09
3				117113	Bahan untuk Pemeliharaan	09
4				131111	Tanah	09
5				132111	Peralatan dan Mesin	09
6				133111	Gedung dan Bangunan	09
7				134111	Jalan dan jembatan	09
8				134113	Jaringan	09
9				135121	Aset Tetap Lainnya	09
10				136111	Konstruksi Dalam pekerjaan	09
11				137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	09
12				137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	09
13				137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan jembatan	09
14				137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	09
15				137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	09
16				152111	Piutang Tagihan/Tuntutan Perpendidikan/penitiban/Ganti Rugi	09
17				166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	09

Gambar 1. Menu Rekonsiliasi Internal

Menu Rekonsiliasi Internal dapat berfungsi dengan baik. Satuan kerja dapat menggunakan menu tersebut dalam membandingkan nilai asset pada data general ledger (Neraca) dengan data subledger. Jika tidak terdapat selisih, artinya semua inputan dari subledger sudah terposting ke general ledger, sehingga dapat dipastikan bahwa saldo di Neraca sudah sesuai dengan inputan pengguna.

Untuk memenuhi kebutuhan data yang lebih komprehensif, MonSAKTI tidak hanya menyediakan menu rekonsiliasi internal, tetapi juga dilengkapi dengan rekonsiliasi eksternal. Akses rekonsiliasi eksternal dapat dilakukan melalui user interface seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Rekonsiliasi SAKTI - SPAN Sampai Dengan Periode 2024-09						
Data Rekonsiliasi diperbarui setiap 6 jam, pembaharuan terakhir pada: 22-10-2024 10:29 Penerbitan SHR diperbarui setiap jam, pembaharuan terakhir pada: 22-10-2024 12:00						
PERIODE 2024-09		DATA SAMA		CARI DI HALAMAN... Q		
NO	BAES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	PERIODE	STATUS REKONSILASI	TANGGAL SHR
1				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-17 09:00:27
2				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-17 14:05:50
3				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-14 02:00:23
4				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-13 14:00:18
5				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-09 17:00:19
6				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-11 15:00:30
7				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-09 17:00:19
8				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-11 11:00:24
9				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-14 10:00:25
10				2024-09	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2024-10-14 15:00:22

Gambar 2. Menu Rekonsiliasi Eksternal

Menu Rekonsiliasi Eksternal berfungsi untuk membandingkan data satuan kerja dengan data Kuasa Bendahara Umum Negara pada item yang telah ditentukan. Selisih tergambar pada data Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) yang terdiri dari TDK Rupiah, TDK Chart of Account (COA) dan TDK Detail. Menu tersebut sudah dapat melakukan penyandingan dan menerbitkan Surat Hasil

Rekonsiliasi (SHR) jika sudah tidak terdapat TDK. Dengan tidak terdapatnya TDK pada Rekonsiliasi Eksternal, maka data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat diyakini kebenarannya.

To Do List

MonSAKTI, sebagai aplikasi pelaporan keuangan yang komprehensif, dilengkapi fitur daftar tugas (to do list) yang berfungsi sebagai panduan bagi satuan kerja dalam menyelesaikan seluruh persyaratan pelaporan. Fitur ini sangat berguna, terutama dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, karena dapat membantu memastikan bahwa tidak ada langkah penting yang terlewatkan. Dengan memanfaatkan fitur ini secara efektif, satuan kerja dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Fitur ini dapat diakses melalui tampilan antarmuka seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Todo List Semua Periodasi (Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan dan Lainnya) Periode 2024-09					
Semua Todo List LAINNYA, semua Todo List WTB disesuaikan. Gunakan filter periode untuk memerlukan data sesuai periode yang dingin.					
▼ TODAY ADA FILTER					
NO	MENU	MODEL	PERIODASI	JUMLAH	CARI DI HALAMAN
1	TK Internal Belum TM Internal Aset	MAP	BULANAN		
2	Perseleksian Belum Didekati	PER	BULANAN		
3	Aset Belum Didekati	MAP	BULANAN		
4	RK Aset ke Perseleksian Belum BM	MAP	BULANAN		
5	Perseleksian Belum Approve	PER	BULANAN		
6	Aset Belum Validasi Approve	MAP	BULANAN		
7	RK Perseleksian Belum RM	PER	BULANAN		
8	RK Perseleksian ke Aset Belum RM	MAP	BULANAN		
9	RK Aset Belum RM	MAP	BULANAN		
10	TK Pungutan Belum TM	AMR	TRIWULANAN		
11	Monitoring TK Pungutan Belum TM Pungut	AMR	TRIWULANAN		
12	TK Perseleksian Belum TM	PER	TRIWULANAN		
13	TK Internal Belum TM Internal Perseleksi	PER	TRIWULANAN		
14	TK Aset Belum TM	MAP	TRIWULANAN		
15	Belum Penyisihan Pungut	AMR	SEMESTERAN		
16	Saldo Akun Uang Yang Belum Diterima Tagihannya	GUP	TAHUNAN		
17	Transaksi Regresional	GUP	TAHUNAN		
18	Saldo Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	GUP	TAHUNAN		
19	Pengembalian Masa In Realiasi Selain Akun ST1000	GUP	TAHUNAN		
20	Pagu Minus Akun ST1000 (Batas 900)	GUP	LAINNYA		
21	Kerdikessarian Akun Vs Kode Barang Aset Terap/HFB	MAP	LAINNYA		
22	Saldo Akun Total Nomor	GUP	LAINNYA		
23	Kerdikessarian Akun Vs Kode Barang Perseleksi	GUP	LAINNYA		

Gambar 3. Menu To Do List

Aplikasi MonSAKTI sudah dapat menayangkan 26 to do list dengan rincian : 9 to do list bulanan, 5 to do list triwulanan, 1 to do list semesteran, 4 to do list tahunan, dan 7 to do list lainnya. Semua menu to do list dapat diakses dan digunakan oleh pengguna agar dapat lebih efektif dalam memantau dan memperbaiki kualitas laporan keuangan. PER-8/PB/2023 menyebutkan terdapat 29 to do list, namun aplikasi MonSAKTI baru menampilkan 26 to do list. Terdapat 3 to do list yang belum difasilitasi oleh sistem dengan rincian sebagai berikut:

1. To do list Belum Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi ATB (Belum Tutup Modul Aset Tetap Periode Semesteran). To do list ini mengindikasikan adanya saldo aset tetap yang belum diakui penyusutannya akibat penurunan kapasitas dan manfaat. Meskipun to do list tersebut belum terdapat pada menu to do list aplikasi MonSAKTI, namun pengguna dapat menggunakan menu Monitoring Tutup Buku Modul sebagai alternatif. Menu Monitoring Tutup Buku Modul dapat diakses pada MonSAKTI melalui tautan <https://monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monlap/ledger/tutupSubsatker/1>.
2. To do list Saldo Akun Hibah yang Belum Disahkan. To do list ini menunjukkan bahwa terdapat penerimaan kas hibah pada modul

bendahara dan/atau pencatatan BAST hibah barang/jasa/surat berharga pada modul komitmen, namun belum dilakukan pengesahan hibah. Meskipun to do list tersebut belum terdapat pada menu to do list aplikasi MonSAKTI, namun pengguna dapat menggunakan menu Laporan Rincian Keuangan sebagai alternatif. Pengguna MonSAKTI dapat mengakses menu Laporan Rincian Keuangan melalui tautan <https://monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monlap/persediaset/laporanRincianKeuangan2> dan memilih kode akun "Hibah Langsung yang belum disahkan" sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Menu Laporan Rincian Keuangan

3. To do list Selisih Transfer Kas BLU antar Satker BLU. To do list ini menunjukkan bahwa terdapat selisih saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) berkenaan dengan proses transfer kas. Meskipun to do list tersebut belum terdapat pada menu to do list aplikasi MonSAKTI, namun pengguna dapat menggunakan menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk sebagai alternatif. Menu tersebut dapat diakses pada MonSAKTI melalui tautan <https://monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monlap/ledger/rekapMenuPelaPoran/13>.

Monitoring

Fitur monitoring pada MonSAKTI digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan satker dalam melihat tingkat penyelesaian to do list dan/atau memberikan informasi transaksi-transaksi tertentu yang perlu ditindaklanjuti. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengawasan yang komprehensif terhadap berbagai aspek transaksi keuangan negara, termasuk persediaan, aset tetap, piutang, dan general ledger (GL). Menu monitoring pada MonSAKTI dibagi sesuai sumber data awal subledger sebagai berikut :

1. Monitoring Persediaan. Monitoring persediaan menyajikan transaksi-transaksi dari modul persediaan yang telah diidentifikasi sebagai objek pengawasan. Monitoring persediaan berperan dalam mengawasi seluruh transaksi yang berkaitan dengan barang-barang persediaan milik negara, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran. Dengan adanya menu ini pada MonSAKTI, pemerintah dapat memastikan bahwa persediaan milik negara dikelola dengan baik, tidak terjadi penyimpangan, dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Monitoring Aset Tetap. Monitoring aset tetap menyajikan transaksi-transaksi dari modul aset tetap yang telah diidentifikasi sebagai objek pengawasan. Monitoring ini berfokus pada aset-aset negara yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Modul ini memungkinkan pemerintah untuk melacak keberadaan, nilai, dan penggunaan aset tetap secara real time melalui MonSAKTI. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan aset negara dan memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola secara efisien.
3. Monitoring Piutang. Monitoring piutang menyajikan transaksi-transaksi dari modul piutang yang telah diidentifikasi sebagai objek pengawasan. Monitoring piutang pada MonSAKTI ditujukan untuk memantau semua tagihan yang belum terbayar kepada negara. Modul ini membantu pemerintah dalam mempercepat proses penagihan, mencegah terjadinya piutang macet, dan meningkatkan pendapatan negara.
4. Monitoring General Ledger dan Pelaporan (GLP). Monitoring GLP menyajikan data-data yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tutup buku yang berefek ke kualitas laporan. Dengan adanya menu ini, pemerintah dapat mencegah kesalahan pencatatan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta mempermudah proses penyusunan laporan keuangan.

Seluruh menu monitoring pada MonSAKTI dapat diakses dan sudah lengkap sesuai PER-8/PB/2023. Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai aktivitas transaksi yang relevan, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi potensi masalah atau anomali yang perlu ditindaklanjuti.

Daftar/Rincian

Menu Daftar/Rincian digunakan untuk menyajikan transaksi lebih detail dan dapat digunakan sebagai bahan untuk membantu penjelasan dalam pengungkapan pada Laporan Keuangan. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap transaksi-transaksi keuangan. Menu Daftar/Rincian dapat diakses pada MonSAKTI dengan rincian sebagai berikut :

1. Daftar Buku Besar. Daftar ini merupakan daftar lengkap semua akun yang digunakan dalam sistem akuntansi. Daftar buku besar menunjukkan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir setiap akun.
2. Daftar Jurnal Umum dan Penyesuaian. Daftar ini berisi rincian semua jurnal yang dibuat, baik jurnal umum maupun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan akun-akun pada akhir periode akuntansi.
3. Daftar List Jurnal Manual Modul GLP. Daftar ini berisi rincian jurnal-jurnal yang dibuat secara manual dalam modul general ledger.
4. Daftar Rincian Saldo Akun. Daftar ini menyajikan rincian saldo setiap akun pada akhir periode akuntansi.
5. Rincian Saldo Neraca. Daftar ini merupakan rincian dari saldo yang tercantum dalam neraca, baik aset, kewajiban, maupun ekuitas.
6. Daftar Barang Hilang. Daftar ini berisi rincian barang-barang yang hilang selama periode tertentu.

7. Daftar Barang Usul Rusak Berat ke Pengelola. Daftar ini berisi rincian barang-barang yang diajukan untuk dinyatakan rusak berat.
8. Daftar BMN Henti Guna. Daftar ini berisi rincian barang milik negara (BMN) yang sudah tidak dapat digunakan lagi.

Seluruh menu Daftar/Rincian pada MonSAKTI dapat diakses dan sudah lengkap sesuai PER-8/PB/2023. Pengguna dapat menggunakan menu Daftar/Rincian sebagai alat bantu dalam membuat penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Fitur Rekonsiliasi, To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian dirancang untuk menyempurnakan proses penyusunan Laporan Keuangan. Dengan fitur-fitur ini, satuan kerja dapat memastikan akurasi data, memenuhi tenggat waktu pelaporan, dan memperoleh Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yang sesuai dengan standar. Alhasil, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan rekonsiliasi dan monitoring dalam Aplikasi MonSAKTI dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai pedoman detail dalam memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan pemerintah. Pengawasan sesuai PER-8/PB/2023 ini dilakukan melalui pemeriksaan langsung dokumen dan data serta pemantauan melalui Aplikasi MonSAKTI. Pada MonSAKTI terdapat menu/fitur Rekonsiliasi, To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian.
2. Menu Rekonsiliasi, baik Rekonsiliasi Internal maupun Rekonsiliasi Eksternal, dapat diakses dengan baik dalam melakukan proses penyandingan data dan dapat menerbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). SHR yang dihasilkan melalui fitur rekonsiliasi berfungsi sebagai bukti otentik bahwa proses pencocokan data telah dilakukan dengan benar dan hasilnya sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan adanya menu Rekonsiliasi, pengguna dapat meyakini seluruh transaksi sudah sesuai dan telah dilakukan penginputan ke sistem SAKTI.
3. Fitur to do list di MonSAKTI berfungsi sebagai daftar tugas yang harus diselesaikan oleh satuan kerja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Semua menu to do list dapat diakses dan digunakan oleh pengguna agar dapat lebih efektif dalam memantau dan memperbaiki kualitas data. PER-8/PB/2023 menyebutkan terdapat 29 to do list, namun aplikasi MonSAKTI baru menampilkan 26 to do list. Meskipun terdapat 3 to do list yang belum difasilitasi oleh sistem pada menu to do list, pengguna dapat menggunakan alternatif menu lain untuk melakukan pemantauan. Sebaiknya dilakukan pengembangan lanjutan pada MonSAKTI untuk mengakomodir to do list yang belum ada di sistem.
4. Fitur monitoring pada MonSAKTI digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan satker dalam melihat informasi data transaksi sebagai

sumber laporan keuangan. Seluruh menu monitoring pada MonSAKTI dapat diakses dan sudah lengkap sesuai PER-8/PB/2023. Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai aktivitas transaksi yang relevan, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi potensi masalah atau anomali yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan laporan keuangan.

5. Seluruh menu Daftar/Rincian pada MonSAKTI dapat diakses dan sudah lengkap sesuai PER-8/PB/2023. Pengguna dapat menggunakan menu Daftar/Rincian sebagai alat bantu dalam membuat penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 54–74. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409>
- Chairmanita, D. (2023). Penyempurnaan Proses Rekonsiliasi Melalui Sakti: Penerapan Metode Business Process Improvement Pada Akuntansi Pemerintah Pusat Republik Indonesia Refining Reconciliation Process Through Sakti: An Application Of Business Process Improvement On Government Accounting In Republic Of Indonesia. *Jurnal Disprotek*, 14(2), 99–105. <https://doi.org/10.34001/jdpt>
- Dewi Astuti, R., Nizar Hidayanto, A., Rachmawati, R., Azzahro, F., & Muchtar, A. (2023). *Survei Tingkat Kepuasan Pengguna atas Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPb Tahun 2023*.
- Khuluq, A., Gata, W., Lasmana Putra, J., & Bella Novitasari, H. (2022). Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Pasca Penerapan Single Database Sakti Menggunakan Finite State Automata. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 6(1), 232–241.
- Marpaung, A. S. (2020). *Analisis Pemanfaatan Aplikasi “Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Monsakti)” Dengan Metode Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2(UTAUT 2)*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemerintah Republik Indonesia (2021). Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- Pemerintah Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Keuangan 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- Pemerintah Republik Indonesia (2023). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Pratiwi, A., Maulida Vonna, S., & Harmi, M. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagan Raya. *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 12(2).
- Salsabila, A. N., & Laksmi, A. C. (2024). Analisis To Do List Pada Aplikasi MonSAKTI Tahun 2023. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(1), 511.